



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET
UNIT KERJA : STAF KHUSUS PRESIDEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANAK AGUNG GDE NGURAH ARI DWIPAYANA
2. Jabatan : KOORDINATOR STAF KHUSUS PRESIDEN
3. NHK : 436159

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 6.392.329.461**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m2/175 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 467.329.461
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 2.300.000.000
3. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 3.325.000.000
4. Tanah Seluas 80 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 538.070.135**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 1.557.753
2. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.232.687
3. MOBIL, NISSAN SERENA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 145.861.875
4. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 164.160.000
5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.800.000
6. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 23.929.200



7. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI
Rp. 13.528.620

8. MOBIL, NISSAN MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
175.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 61.626.528

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.822.754.015

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 9.814.780.139

III. HUTANG Rp. 2.270.883.051

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 7.543.897.088

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.